

Kolom

Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019

Harun Ar-rasyid - detikNews

Sabtu 11 Mei 2019, 14:00 WIB



Foto: Rinto Heksantoro

Jakarta -

Dalam filsafat klasik abad kelima, banyak para ilmuwan Yunani mendiskusikan gagasan kebenaran dengan menggunakan prinsip dialog dua arah yang terkoneksi satu sama lain. Hal inilah yang kemudian menghasilkan sebuah dialektika; konsep yang menyatakan bahwasanya ilmu pengetahuan mempunyai antar-keterkaitan yang logis, empiris, dan saling mempengaruhi satu sama lain (Richard, 1979).

Begitu juga dengan dimensi keilmuan populisme dan politik identitas. Narasi-narasi politik populisme yang sarat akan dengan isu-isu identitas tidak akan berjalan efektif tanpa ide populis yang melandasinya. Tujuannya adalah menciptakan perasaan persatuan antarkelompok tertentu yang pada akhirnya menciptakan suasana ketakutan seperti ditindas, dipinggirkan, atau dilecehkan yang narasinya *anti-establishment*.

Keterkaitan studi populisme dan politik identitas bisa dijelaskan dalam penelitian yang berjudul *Political Identities: The Missing Link in The Study of Populism* (Melendez & Cristobal, 2017). Argumen akademik (*theoretical review*) Melendez & Cristobal dalam penelitian ini ialah populisme dapat berkembang hanya ketika politik identitas *anti-establishment* ada.

Artinya, populisme yang mengklaim bahwa konsep rakyat merupakan kehendak mutlak, dijadikan sasaran oleh narasi-narasi identitas *anti-establishment* para politisi populis. Mereka mengklaim bahwa para elite yang berada di pemerintahan yang mapan bukanlah orang-orang yang mendukung rakyat.

Irasionalitas

Politisi populis merupakan orang-orang karismatik dalam menjadi pemimpin. Ia digambarkan sebagai pahlawan tunggal yang naik di atas panggung dalam lingkungan mereka yang terpinggirkan, sehingga dengan mudah mendapatkan banyak pengikut. Dalam menarasikan isu-isu populis, mereka menggunakan terminologi seperti anti-kapitalis, anti-oligarki, atau anti-imperialis untuk menyamakan mereka sebagai rakyat biasa.

Perbedaan pandangan ideologis serta melihat basis masyarakat pendukung membentuk sebuah karakter masing-masing pemimpin populis untuk mempunyai corak narasi yang berbeda. Tetapi, politisi populis mempunyai corak pola yang sama, yakni pandangan mereka yang bersifat irasionalitas.

Dalam hal ini, Andreas Schedler mempunyai tiga klasifikasi corak politisi populis yang narasinya irasionalitas. Pertama, irasionalitas instrumental (*cognitive-instrumental irrationality*). Banyak politisi populis menuduh musuh mereka tidak kompeten dalam memerintah negara. Bahkan, politisi populis *anti-establishment* mengatakan bahwa elite-elite yang berada di pemerintahan merupakan orang-orang buruk dari ahli yang buruk (Schedler, 1996).

Elite-elite pemerintah menurut mereka tidak hanya bodoh dalam mengelola negara, tetapi juga minim akal sehat dalam berpolitik. Misalnya, menggambarkan pejabat publik sebagai amatir, tidak kompeten, tidak masuk akal, berpandangan pendek, tidak realistis, kacau, bingung, tergesa-gesa, kontradiktif, dan sebagainya.

Kedua, irasionalitas normatif (*normative irrationality*). Politisi populis *anti-establishment* mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Mereka berpolemik melawan pengkhianatan, korupsi, ketidakadilan, dan ancaman bangsa asing. Menurut retorika para pemimpin populis, pejabat publik menghabiskan sebagian besar waktu kerja mereka dalam "menjual" rakyat kepada bangsa-bangsa asing.

Selain itu, para populis menganggap bahwa satu-satunya hal yang pejabat publik dan elite-elite pemerintah minati adalah untuk memajukan kepentingan egois untuk diri mereka sendiri.

Terakhir, irasionalitas ekspresif (*expressive irrationality*). Para populis *anti-establishment* biasanya mengedepankan pandangan sinis dan melihat kesenjangan

dalam masyarakat. Para populis menganggap pejabat publik hanyalah aktor yang kata-katanya tidak berharga. Mereka secara rutin berbohong atas janji-janji politik yang diberikan kepada rakyat.

Lebih dari itu, para politisi populis memandang bahwa retorika politik yang di suarkan oleh pejabat-pejabat publik merupakan pepesan kosong. Oleh karenanya, pejabat publik dianggap sebagai dua wajah yang menggunakan standar ganda dalam sebuah drama theater politik saja.

Pola Hubungan

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Tony Blair Institute berjudul *Populists in Power Around the World*, Jordan Kyle dan Limor Gultchin mengatakan bahwa corak populisme di Indonesia merupakan populisme yang tergolong sebagai *cultural populism*. Kyle dan Gultchin menjabarkan bahwa populisme ini mengklaim adanya pemisahan antara konteks orang asli (pribumi) dengan orang asing. Dalam hal ini, identitas orang pribumi digunakan sebagai narasi untuk membangun pandangan bahwa orang-orang asing inilah musuh orang asli.

Meskipun konteksnya merupakan sosio-budaya, para populis biasanya tidak terpaku terhadap menarasikan politik *cultural populism* sebagai isu-isu terhadap budaya saja. Mereka bisa saja menarasikan hal-hal yang terkait dengan ekonomi sebagai pendorong untuk efektivitas dalam membuat narasi budaya tersebut. Dengan demikian, mereka membentuk sebuah antar-keterkaitan (dialektika) terhadap isu-isu tersebut yakni dengan mengklasifikasikan para elite-elite rezim pemerintah sebagai musuh bersama.

Narasi *anti-establishment* ini biasanya menuntut pemerintahan yang mapan untuk menyelesaikan hal-hal ekonomi seperti penghapusan praktik korupsi, menurunkan harga bahan pokok, dan mengembalikan pengaruh orang asli dalam praktek perekonomian di negara.

Dengan demikian, para aktor-aktor populis ini berhasil memanfaatkan identitas *anti-establishment* sebagai kekuatan politik. Secara tidak langsung, mereka membentuk sebuah hubungan seperti yang Schedler katakan sebagai *A Triangular Symbolic Space* dengan klasifikasi tiga aktor utama yakni pemerintah, rakyat, dan para populis itu sendiri. (Schedler, 1996).

Pola ini menggambarkan bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat dipandang sebagai representasi orang-orang jahat dan licik, sedangkan hubungan masyarakat dan

aktor populis *anti-establishment* hidup dalam harmoni yang dianggap sebagai pahlawan. Narasi ini juga membentuk anggapan bahwa mereka yang "di atas" tidak termasuk dalam komunitas dari mereka yang ada "di bawah". Dengan kata lain narasi ini membentuk sebuah pandangan identitas: mereka bukan hanya musuh, tetapi juga representasi orang-orang asing (*the others*).

Argumen ini mendukung bahwasanya para politisi populis sering membingkai dan menggabungkan dua atau tiga tipe populisme tersebut, tergantung dengan kondisi sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Demikian juga, bagaimana kondisi pemilih yang termotivasi oleh banyaknya masalah yang dinarasikan dalam sosial-politik seperti, melihat pemimpin populis semata-mata melalui kacamata ekonomi, budaya, atau identitas *anti-establishment*.

Kasus Indonesia

Pada Pemilihan Umum 2019, politik identitas *anti-establishment* kembali menguat ketika beredarnya narasi-narasi yang membawa konsep populisme. Uniknya, identitas *anti-establishment* ini dikait-kaitkan oleh identitas agama yang selalu dipakai politisi populis untuk menarasikan bahwa pemerintah memarginalkan kelompok muslim.

Misalnya Gerakan "2019GantiPresiden", "partai setan vs partai Allah", *people power*, tidak percaya kepada lembaga-lembaga mapan (KPU dan MK) maupun lembaga independen (*quick count*, dll). Jika digunakan terus-menerus, politik identitas *anti-establishment* agama yang memperhatikan semangat golongan dan partai ketimbang semangat persatuan menyebabkan polarisasi yang meluas di kalangan masyarakat ataupun para elite-elite politik.

Para politisi seharusnya lebih berfokus kepada narasi politik sehat yang mempersatukan dan mendamaikan para pendukungnya dengan mengedepankan rasionalitas bukan emosionalitas ataupun kepentingan kelompok agama tertentu. Bahkan, elite-elite politik seharusnya lebih mengedepankan isu-isu nasional yang membangun secara progresif dan substantif terhadap narasi-narasi politiknya.

Masyarakat Indonesia harus mulai mampu berpikir rasional dan kritis, terutama dengan isu-isu politik dan agama yang cenderung dimanipulasi oleh elite-elite politik. Preferensi politik masyarakat harus lebih didasarkan pada keberanian berpikir sesuai nalar rasionalnya di tengah cengkeraman elite-elite dan otoritas politik keagamaan. Keberanian dalam berpikir rasional serta menjadi individu yang kritis membuat terciptanya masyarakat yang terbuka serta toleran dalam menghadapi isu-isu

sosial-politik.

Harun Ar-Rasyid mahasiswa *Sejarah Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

(mmu/mmu)